

STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TERHADAP KAPAL IKAN ASING PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Oleh:
Ropita Kartika
190574201071

Abstrak

Penelitian ini membandingkan pengaturan peraturan mengenai kapal ikan asing dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985* dan membahas kelebihan dan kekurangan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang dikomparasikan dengan *Malaysia Fisheries Act 317 of 1985*. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif, fokus pada perbandingan regulasi kapal ikan asing di kedua undang-undang. Temuan utama mencakup perbedaan dalam definisi kapal ikan asing. Undang-Undang Indonesia bersifat umum, sementara Malaysia memberikan definisi yang lebih spesifik dan berfokus pada asal-usul kapal. Perbedaan juga terdapat dalam perizinan, dengan Indonesia menekankan SIPI dan izin usaha, sementara Malaysia mengatur izin berdasarkan perjanjian internasional. Dalam sanksi pidana, Indonesia memberlakukan sanksi yang lebih berat, mencakup pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp20.000.000.000 yang ditargetkan kepada nakhoda dan ABK. Sementara itu, Malaysia lebih fokus pada denda dan hukuman penjara untuk nakhoda, kru, dan korporasi. Kesimpulannya, Undang-Undang Indonesia kurang memberikan definisi yang jelas mengenai kapal ikan asing, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Malaysia memberikan definisi yang lebih rinci dan pengaturan izin yang komprehensif. Meskipun Indonesia memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi, perbedaan dalam regulasi mencerminkan tujuan yang sama, yaitu melindungi sumber daya perikanan dan memastikan keberlanjutan eksploitasi perikanan. Peneliti menyarankan agar revisi Undang-Undang Perikanan mencakup penjelasan definisi kapal perikanan asing dan mempertimbangkan pengakuan prinsip ekstrateritorialitas. Dalam Akta Perikanan Malaysia, sanksi lebih utama sementara Indonesia, pidana penjara diutamakan

Kata Kunci: Peraturan, Perikanan, Kapal Asing, *Fisheries Act*

**COMPARATIVE STUDY OF LEGAL REGULATIONS ON FOREIGN
FISHING VESSELS IN INDONESIAN AND
MALAYSIAN LEGISLATION**

**By:
Ropita Kartika
190574201071**

Abstract

This research compares the regulations regarding foreign fishing vessels in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries with the Malaysia Fisheries Act 317 of 1985 and discusses the advantages and disadvantages of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries compared with the Malaysia Fisheries Act 317 of 1985. The research method uses qualitative analysis, focusing on comparing regulations on foreign fishing vessels in both laws. Key findings include differences in the definition of foreign fishing vessels. Indonesian law is general, while Malaysia provides a more specific definition and focuses on the origin of the ship. Differences also exist in licensing, with Indonesia emphasizing SIPI and business permits, while Malaysia regulates permits based on international agreements. In terms of criminal sanctions, Indonesia imposes heavier sanctions, including imprisonment of up to 6 years and fines of up to IDR 20,000,000,000 targeted at the captain and crew. Meanwhile, Malaysia is more focused on fines and prison sentences for captains, crew and corporations. In conclusion, Indonesian law does not provide a clear definition of foreign fishing vessels, potentially creating legal uncertainty. In contrast, Malaysia provides more detailed definitions and comprehensive permit arrangements. Even though Indonesia has higher criminal sanctions, the differences in regulations reflect the same goals, namely protecting fisheries resources and ensuring the sustainability of fisheries exploitation. Researchers suggest that the revision of the Fisheries Law include clarifying the definition of foreign fishing vessels and consider recognizing the principle of extraterritoriality. In Malaysia's Fisheries Act, sanctions are more important, while in Indonesia, imprisonment is more important

Keywords: Regulations, Fisheries, Foreign Ships, Fisheries Act